

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh:
Remi Dode¹

ABSTRAK

Artikel ini akan mengkaji strategi dari pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arujaya Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat. Dalam mengkaji teori yang digunakan untuk melihat permasalahan terkait pembangunan infrastruktur jalan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu teori dari Aprillia Theresia, yang mengatakan bahwa, pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi lapangan serta melalui kajian dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah desa belum maksimal atau belum berhasil dalam melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arujaya Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang dilakukan masih bersifat dari atas kebawah yang pada gilirannya menimbulkan dominasi pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan lain seperti pemberdayaan masyarakat terabaikan yang secara tidak langsung hal tersebut berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Kata Kunci: Pembangunan; Infrastruktur; Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This article will examine the strategy of the government in carrying out road infrastructure development based on community empowerment in Arujaya Village, Tabaru District, West Halmahera Regency. In examining the theory used to look at problems related to community empowerment-based road infrastructure development, namely the theory from Aprillia Theresia, which says that development is an effort or process of change, in order to achieve a level of welfare or quality of life of a community (and the individuals in it). will and carry out that development. The method used in this study is a qualitative research method by collecting data through direct interviews, field observations and through document review. Based on the results of the study, it was found that the village government had not been maximized or had not succeeded in carrying out road infrastructure development activities based on community empowerment in Arujaya Village, Tabaru District, West Halmahera Regency. This is because the development carried out is still from the top down which in turn leads to government domination in the development process, so that other activities such as community empowerment are neglected which indirectly has an impact on the lack of community participation in the development process in the village.

Keywords: Development; Infrastructure; Community development

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Di Indonesia pembangunan merupakan suatu masalah yang sering kali dibicarakan belakangan ini, yang tidak lain adalah mencari solusi atau jalan keluar terkait perkembangan pembangunan serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dalam konteks Negara, upaya untuk membawa pembangunan kearah lepas landas, yaitu menuju pertumbuhan perekonomian rakyat lewat pengentasan kemiskinan, dalam pelaksanaannya tentu tidak bisa dipisahkan dari berbagai elemen seperti; pemerintah, lembaga, instansi, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Pada dasarnya tujuan dari suatu pembangunan itu ialah untuk mensejahterakan atau memperbaiki taraf hidup manusia kearah yang lebih baik, yang tentu dalam pelaksanaannya mensyarakat basis komunitas seperti partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian diimplementasikan dengan berbagai cara diantaranya yaitu, dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik seperti, infrastuktur jalan, menyediakan dana atau anggaran, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tentunya bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan mutu-hidup suatu masyarakat kearah hidup yang lebih baik atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Jalan merupakan salah satu sarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan aktifitas atau salah satu sarana penggerak perekonomian suatu masyarakat dari satu lokasi menuju ke lokasi lainnya. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah desa merupakan salah satu pihak yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ditingkat desa khususnya infrastruktur jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2016, pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa "Desa adalah desa dan Desa Adat, atau yang disebut dengan nama lain, selajutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian jikalau kita mengacu pada ketentuan diatas berarti pemerintah desa memiliki kewenangan penuh dalam membangun desa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa "Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa". Dalam ayat ini ditekankan bahwa tujuan utama dilakukannya pembangunan desa itu ialah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Berbicara mengenai upaya pembangunan diwilayah perdesaan, tentunya ada beberapa jenis pembangunan, yang terdiri dari pembangunan fisik dan non-fisik atau dengan kata lain dari segi pembangunan fisik dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), serta pembangunan dari segi sumber daya manusia (SDM). Berkaitan dengan hal ini pembangunan yang dilakukan diDesa Arujaya kecamatan tabaru kabupaten Halmahera barat yaitu jenis pembangunan infrastruktur jalan yang ditujukan kepada masyarakat petani. Yang dimaksud dengan masyarakat petani disini ialah golongan atau sekelompok masyarakat petani yang belum mandiri secara ekonomi. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam pembangunan sangat diperlukan guna pengupayaan pembangunan yang lebih baik lagi serta diharapkan juga agar pelaksanaan pembangunan itu tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan suatu pembangunan ada baiknya jikalau pembangunan itu dipusatkan sepenuhnya kepada masyarakat, artinya masyarakat harus dijadikan sebagai subjek dari suatu pembangunan bukan objek dari pembangunan itu, mengingat masyarakat sabagai salah satu bagian yang turut menentukan proses pembangunan maka sudah menjadi suatu keharusan kalau pelaksanaan pembangunan itu harus mensyaratkan basis komunitas seperti partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebab dalam peraturan Menteri Desa No.2 Tahun 2016 tentang indeks Desa Membangun pasal 1 ayat, (3) juga menjelaskan bahwa "Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai". Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan agar setiap masyarakat mampu memanfaatkan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan bahwa, kondisi masyarakat di Desa Arujaya khususnya para petani menurut penulis belum mampu memanfaatkan program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa, contohnya terkait pemanfaatan fasilitas umum seperti jalan tani dan pelestarian fasilitas umum lainnya yang ada didesa. sehingga penulis merasa tertarik untuk mencari tau dan akan melakukan penelitian lebih lanjut di Desa Arujaya terkait masalah-masalah maupun hambatan-hambatan tentang pelaksanaan pembangunan serta proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (berkesinambungan) di Desa Arujaya kecamatan tabaru kabupaten Halmahera barat. Untuk itu, dengan adanya program pembangunan infrastruktur jalan, maka sangat diharapkan adanya penanganan yang lebih serius dari pemerintah agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan atau keinginan masyarakat.

Untuk mencapai beberapa tujuan dari pembangunan diatas, seperti yang telah penulis katakan diatas bahwa keberhasilan suatu pembangunan itu harus mensyaratkan adanya basis komunitas seperti pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai penerima manfaat dari suatu pembangunan, maka sudah sewajarnya jikalau masyarakat tersebut diberdayakan untuk mandiri dalam mengelola dan menjadi salah satu aktor penentu dalam proses pelaksanaan pembangunannya sendiri. Pemandirian atau pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan guna mengurangi tingkat kebergantungan masyarakat kepada pemerintah, selain itu pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk memampukan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembuatan kebijakan-kebijakan publik, serta meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Berbicara mengenai pelaksanaan pembangunan tentunya tidak bisa terlepas dari yang namanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat karena kedua aspek tersebut merupakan indikator utama dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, berkaitan dengan hal ini yaitu terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arujaya kecamatan tabaru kabupaten Halmahera barat, hedaknya pemerintah, pemerintah desa serta masyarakat harus menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan pembangunan guna menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik serta dapat tercapai tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu sebagai suatu proses untuk mencapai tingkat kesejahteraan serta memperbaiki taraf hidup atau mutu-hidup suatu masyarakat kearah yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana. Menurut Anwas (2013:41), bahwa pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalm meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan menurut Todoru, (2010: 18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya sekedar fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus meliputi sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Adapun pendapat dari Goulet dalam Theresia (2014:22), mengemukakan sedikitnya tiga nilai-nilai yang berkembang didalam yaitu: a) suwasembadah dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup seperti pangan, sandang, perumahan atau pemukiman kesehatan, pendidikan dasar, keamanan rekreasi. b) harga diri dalam artian berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada pihak lain terlepas dari penindasan fisik dan ideology dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka. c) kebebasan dalam artian adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternative-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terurus-meneurus bagi indiviu-individu bagi setiap awarga masyarakat.

Menurut Theresia (2015:2), Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Sedangkan Menurut Mardikanto (2013:105), Pembangunan ialah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-

menerus oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Kemudian Menurut Adrian Leftwich dalam Winarno (2013:41), menerangkan bahwa Pembangunan yang paling umum dikategorikan kedalam Sembilan pendekatan pokok, yakni pembangunan dilihat sebagai kemajuan historis, pembangunan sebagai eksploitasi sumber daya alam, pembangunan sebagai promosi kemajuan ekonomi, pembangunan sebagai perubahan struktural, pembangunan sebagai modernisasi, dan pembangunan sebagai suatu peningkatan produksi.

Sedangkan menurut Mudrajat, (2012:27) pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dan untuk mempengaruhi massa depan ada lima implikasi utama defenisi tersebut:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik manusia atau kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai kesejahteraan
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri yang ada padanya, kepercayaan dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan.
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara sendiri.
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

B. Konsep Infrastruktur Jalan

Menurut Adji Adisasmita (2011:79), mengatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawa permukaan tanah atau air atau diatas permukaan air. Menurut Sjafrizal, (2012:35), jalan merupakan persyarataan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung, pertumbuhan suatu daerah dengan kawasan perumahan dan pemukiman, serta daerah pingiran. infrastruktur Jalan juga bertujuan untuk menunjang sebagai pusat pertumbuhan dan pemerataan dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, kemudian Menurut Parikesit, dkk dalam Nyoman (2014:14), menyatakan bahwa infrastruktur jalan adalah sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Awang Dalam Hayat (2018:91), mengemukakan bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

. Menurut Farudin (2012:16), Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komonitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.

Menurut Paul, Sedarmayanti, (2014:80), menyatakan bahwa: Pemberdayaan masyarakat adalah pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politisi dan kekuasaan kelompok yang lemah sehingga memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-pembangunan.'

Menurut Rappaport dalam Anwas (2013:49), Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komonitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa diatas kehidupannya sendiri. Dengan demikian juga Prason dalam Anwas (2013: 49), mengatakan bahwa pemberdayaan menekankan dan memperoleh pada ketrampilan,

pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempertahankan kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian

Sedangkan menurut Sulistiyani (2017:77), bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh daya atau kekuatan/ kemampuan dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang memiliki daya dan pada pihak yang belum memiliki daya.

Subejo dan Narimo dalam Mardikanto (2014:75) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana usaha-usaha orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat menyatukan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan dan memungkinkan masyarakat itu meyumbang secara penuh bagi kemajuan nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif. Sugiyono (2014:8) dan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur yang dalam hal ini pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Arujaya Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, dengan memberdayakan masyarakat. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori dari Theresia (2015:2), yang mengatakan bahwa; Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam menganalisis data dilakukan dengan tahapan melakukan reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan aspek teoritis.

PEMBAHASAN

A. Pembangunan Infrastruktur Jalan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arujaya Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat.

Pembangunan pada hakikatnya ialah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus-menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai perbaikan mutu hidup dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus-menerus mengalami perubahan. Meskipun demikian, didalam praktik, perencanaan pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakekatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama untuk kemudian terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang juga dimaksudkan untuk terus memperbaiki mutu hidup masyarakat (dan individu-individu di dalamnya). Seperti yang dikemukakan oleh Theresia bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

a. Pembangunan yang bersifat Partisipatif.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penganggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan upaya tersebut hanya bisa dicapai dengan menggunakan basis komunitas yang mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terutama pada penduduk miskin di perdesaan. Seperti yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, bahwa dalam hal pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tani di desa aru jaya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan (masyarakat 31) diatas bahwa pembangunan infrastruktur jalan tani yang dilaksanakan belum maksimal. Dalam artian bahwa pembangunan infrastruktur jalan tani yang dibangun oleh pemerintah Desa Arujaya belum bisa dikatakan berhasil. Sebab suatu kegiatan pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan pembangunan tersebut dapat memberi dampak atau fluktuasi positif terhadap perubahan mutu-hidup suatu masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Terkait Pembangunan

infrastruktur jalan tani di Desa Arujaya, seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Desa Arujaya diatas bahwa; upaya pembangunan jalan yang dilakukan belum bisa memberi dampak positif terhadap masyarakat khususnya masyarakat tani, hal ini disebabkan karena pembangunan jalan yang dilakukan masih dalam bentuk jalan setapak dan kondisi tersebut masih menyulitkan masyarakat petani dalam hal mengakses hasil pertaniannya keluar, karena selain jalannya sempit masyarakat juga mengalami kesulitan disaat musim hujan karena jalannya rusak.

Oleh sebab itu peran serta masyarakat sudah harus diterapkan sejak penggalian permasalahan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan demi keberlanjutan. Peran serta masyarakat terus didorong dan dikuatkan untuk dapat mengorganisir diri, termasuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah sesuai dengan kebutuhannya. Sebab seluruh proses kegiatan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dengan menyertakan peran serta masyarakat pada hakikatnya memiliki dua dimensi, yaitu; a) memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab, b) menyediakan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

Secara umum tujuan dari pembangunan infrastruktur pedesaan dengan penyertaan peran masyarakat adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan (organisasi) dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah; a) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian, b) mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan, c) meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, dan atau kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Pembangunan yang berpusat pada Kesejahteraan Masyarakat.

Upaya-upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari sering disebut dengan upaya "Pembangunan" dalam artian bahwa pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Theresia bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu didalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Artinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembangunan itu harus dipusatkan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang mensyaratkan basis komunitas yang dilakukan dengan cara pemberdayaan guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan yang berpusat pada masyarakat ialah suatu pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek dari suatu pembangunan. Dalam artian bahwa pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pembangunan itu harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sehingga segala upaya pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

c. Pembangunan yang Berkelanjutan (berkesinambungan).

Dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pembangunan itu dapat menjadi proses perubahan terhadap mutu hidup manusia atau masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan harus dilaksanakan secara terus-menerus agar dapat memperbaiki permasalahan ekonomi, sosial dan budaya suatu masyarakat ke arah yang lebih baik.

B. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arujaya.

Hakikat Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ialah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Berkaitan dengan hal ini, dalam melakukan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Arujaya harus memperhatikan beberapa tahapan dalam melakukan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi, sampai pada tahap pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut sebagai berikut:

1. Seleksi Lokasi/Wilayah.

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dengan masyarakat. Penetapan kriteria sangat penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pembangunan berbasis masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

2. Sosialisasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang telah dikomunikasikan.

3. Proses Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan taraf hidup suatu masyarakat ke arah yang lebih baik atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dalam proses tersebut masyarakat dengan pemerintah bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.
- b) Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian.
- c) Menerapkan rencana kegiatan kelompok.
- d) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (*participatory, monitoring, and evaluation*).

4. Memandirikan Masyarakat

Berpegang pada prinsip pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan, dimana salah satu prinsip pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tentunya melalui proses pemandirian atau pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah sebagai fasilitator dalam menjalankan kegiatan pembangunan harus menjadikan rakyat sebagai subjek dari suatu pembangunan yang bertujuan untuk menjadikan rakyat sebagai pelaku pembangunan yang turut menentukan pembangunannya sendiri.

Inti dari setiap upaya pembangunan yang disampaikan melalui kegiatan pemberdayaan, pada dasarnya ditujukan untuk tercapainya perubahan-perubahan perilaku masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu hidup yang mencakup banyak aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, ideologi, politik maupun pertahanan dan keamanan. Karena itu pesan-pesan yang disampaikan oleh fasilitator haruslah mampu mendorong atau mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang memiliki sifat "pembaruan" yang biasa disebut dengan inovasi. Terkait dengan masalah tersebut, maka peningkatan kemampuan masyarakat yang akan diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan adalah diutamakan kepada sikap kemandirian. Pemberdayaan merupakan proses pemandirian masyarakat yang bertujuan untuk mendukung serta memberdayakan masyarakat untuk mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Kegiatan pemandirian masyarakat ialah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan rancangan kegiatan-kegiatan untuk menjawab permasalahan tersebut. hal ini

hanya dapat dicapai dengan menggunakan pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas individu atau masyarakat. Sebab peneliti menilai bahwa penguatan kapasitas merupakan proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas individu merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik didalam entitasnya maupun dalam lingkup global dimana pengembangan kapasitas individu itu meliputi; pengembangan kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.

Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa dalam hal melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Arujaya dalam implementasinya tidak didasarkan pada prinsip pemberdayaan dimana semua kegiatan pembangunan yang ada di Desa Arujaya sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah sehingga keterlibatan masyarakat maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat didominasi atau ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh informan (E.A) diatas bahwa:

“Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah menyediakan sarana berupa jalan atau akses ke lokasi pertanian akan tetapi masih dalam bentuk jalan setapak dan itu masih mempersulit para petani dalam mengakses hasil pertaniannya keluar dari lokasi pertanian. Sebab jalannya rusak kalau cuacanya buruk (hujan), kemudian pemerintah menyediakan bibit dan pupuk untuk para petani tetapi pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai cara perawatan dan pemupukan sehingga sebagian besar tidak berhasil atau gagal panen”

Sumber: hasil wawancara dengan informan Eros Arah pada hari sabtu 13 oktober 2019.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa jikalau kita berpatokan dari teori yang dikemukakan oleh Theresia tentang pembangunan dimana ia mengatakan bahwa, “pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu”, berarti seharusnya semua kegiatan apapun yang ditujukan kepada masyarakat baik itu kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik harus dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat. Artinya bahwa, pemerintah melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki status atau taraf hidup suatu masyarakat. oleh sebab itu adalah sangat menjadi efektif apabila masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan diberdayakan agar mampu secara mandiri dalam menentukan arah pembangunannya sendiri, guna mengantisipasi terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu tujuan lain dari pemandirian masyarakat ini ialah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan memberi penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya keetribatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Arujaya.

Dalam melakukan kegiatan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah perdesaan, tentunya sebagai salah satu pelaku pembangunan peran serta atau partisipasi masyarakat sudah menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan. Secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang mereka berikan, berarti masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan memperbaiki mutu-hidupnya. Berikut peneliti akan menjabarkan beberapa ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dikemukakan oleh AprilliaTheresia yang meliputi empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam; pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.

Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya local dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukannya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan diwilayah setempat atau ditingkat lokal.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Dilain pihak, lapisan yang diatasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dana tau beragam bentuk korbanannya lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan salah satu unsur penting yang sering dilupakan. Sebab, tujuan dari suatu pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu-hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Sayangnya, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dirasakan oleh masyarakat sasarannya, pada hal sasaran sering kali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang telah selesai dilaksanakan menjadi sia-sia.

Berdasarkan beberapa uraian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti yang telah dijelaskan diatas, berkaitan dengan hal ini temuan dilokasi penelitian bahwa; tingkat partisipasi masyarakat Desa Arujaya dalam pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non-fisik didapati sangat minim atau rendah, baik partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, maupun partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Hal ini disebabkan karena minimnya potensi sumber daya manusia atau masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selain itu keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan, pemantauan, dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan dari pemerintah setempat menyebabkan masyarakat sebagai penerima manfaat dari sasaran

pembangunan tersebut kurang bahkan tidak memahami terkait manfaat pembangunan yang mereka terima.

D. Kendala atau Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Arujaya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Arujaya, selain minimnya partisipasi masyarakat terdapat pula beberapa faktor atau kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan di Desa Arujaya seperti pengaruh iklim dan terbatasnya dana/anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut penjelasannya;

1. Faktor Iklim.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa, salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Arujaya yaitu faktor iklim. Sebagai salah satu daerah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, maka tentunya pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas pembangunan jikalau dalam mengimplementasikan program-program kerjanya tidak didasari atas perencanaan pembangunan yang baik dan benar. Kendala tersebut dapat ditandai dengan sulitnya masyarakat dalam mengakses hasil pertaniannya dari lokasi pertanian menuju ke pasar, hal ini disebabkan karena akses jalannya masih berbentuk jalan setapak, selain itu akses jalan tersebut akan mengalami kerusakan disaat turun hujan. Masalah ini bukan hanya dialami oleh masyarakat tetapi juga dialami oleh pemerintah dalam melakukan perbaikan jalan, dimana para pekerja bangunan mengalami kesulitan dalam melakukan pengangkutan material. Hal inilah yang menyebabkan proses pembangunan menjadi kandas.

2. Keterbatasan Dana/Anggaran.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa, salah satu hal yang mejadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Arujaya ialah terkait suntikan dana/anggaran. Dana atau anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan saat ini bersumber dari alokasi dana desa (ADD). Keterbatasan dalam penggunaan dana atau anggaran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ini, disebabkan karena dana yang digunakan dalam pembangunan jalan ini merupakan sisa anggaran dari pembangunan fasilitas umum didesa seperti pembuatan pagar warga, dan berdasarkan hasil turun lapangan pembangunan pagar warga ini pun belum selesai dibangun karena ketersediaan dana ata anggaran yang sangat terbatas.

PENUTUP

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Arujaya, dapat dikatakan belum maksimal sebagai akibat dari kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Buktinya pembangunan yang dilakukan belum mampu menjawab keinginan atau harapan dari masyarakat setempat khususnya masyarakat petani. Terkait pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arujaya, dapat dikatakan masih ditemukan ketidakefektifan pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat dalam melakukan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih tingginya dominasi pemerintah atau pengelola pembangunan dalam melakukan proses pelaksanaan pembangunan, dalam artian bahwa pelaksanaan pembangunan itu masih bersifat dari atas ke bawah (*Top Down*). Sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan hanya diberikan begitu saja tanpa adanya sosialisasi terkait program pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pemanfaatan hasil pembangunan yang sudah selesai dilaksanakan guna tercapai pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan terkait keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Arujaya, ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Arujaya dalam pembangunan masih tergolong sangat minim. Hal ini disebabkan karena, pemerintah dan pemerintah desa kurang berperan aktif dalam memberi sosialisasi terkait pentingnya pembangunan terhadap keberlangsungan mutu-hidup masyarakat, hal ini berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pelaksanaan pembangunan, yang

kemudian menimbulkan rasa acuh tak acuh atau ketidakpedulian masyarakat untuk mau melibatkan diri atau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Adissasmita 2011. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ahmadi. A. 2009. Ilmu Sosial Dasar. *Jakarta Rineka Cipta*
- Anwas O, M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Diera Global*. Bandung: Alfabeta.
- Awang Dalam .Hayat (Ed) 2018. *Reforemasi kebijakan public dalam perspektif makro dan mikro*.Malang. Pernamedia Grup (devisi kencana)
- Fahrudin, A. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora..
- Ismanidar. 2016. Pendidikan Kewarga Negaraan Urisyah. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*.1 (1):150-151.
- I Nyoman 2014. *Pembangunan infrastruktur pedesaan Berbasis ergonomi total yang inklusif dan berkelanjutan*. Udayana University Press.
- Mardikanto, T. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet
- Mudrajat Dalam Hayat. (Ed), 2018. *Reformasi kebijakan public dalam perspektif maro dan mikro*.
- Nasution, 2008. *Menejemen Tranportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siagian, 2008, *Admintrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi Dan strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subejo dan Narimo, dalam mardikanto, T.2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam prespektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sjafrizal, 2012, *Eonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Surdarmayanti, 2014. *Rektruksisasi dan pemberdayaan*. Organisasi Bandung: Retika Aditama.
- Suryono, Agus. (2001). *Teori dan Isu Pembnaganan*. Jakarta : UM-Press.
- Sulistiyani, A.T. 2017, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*.Gaya Media
- Theresia, A. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Todoro, Michael P. 2010. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlanga
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Winarno, B. 2013. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: CAPS.
- Risky P. (2017). *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*. Manado: e-Journal Eksekutif Unsrat.
- Jonathan D. (2018). *Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa*. Manado: e-Journal Eksekutif Unsrat.

Sumber Lain:

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Republik Indonesia, No 2 Tahun 2016. Tentang Indeks Desa membangun.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.